



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 86 /B.06/HK/2021

ABOUT

GRANTING AUTHORITY BUDGET USER (KPA), OFFICIAL COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNATURE OF PAYMENT ORDER (PPSPM), AND HEAD OF EXPENDITURE BUDGET REVENUE AND GOVERNMENT EXPENDITURE (APBN)/DECONCENTRATION ON THE LABOR SERVICE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR BUDGET 2021

GOVERNOR LAMPUNG,

- Read** : Letter from the Labor Service Province of Lampung Number : 800/0213/V.08/01/2021 dated 19 January 2021 Hal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Tahun Anggaran 2021.
- Consider** : a. that in the framework of administrative order, smooth implementation and management of activities that are sourced from Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Deconcentration Year Budget 2021 on the Labor Service Province of Lampung, need to grant Authority Budget User (KPA), Official Commitment (PPK), Official Signature of Payment Order (PPSPM), and Head of Expenditure Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Deconcentration that are responsible both from the physical as well as efficiency and effectiveness of activities intended in accordance with the List of Implementation Budget (DIPA), Work Plan and Budget Ministry/Agency (RKA-KL) that are concerned;
- b. that the Official/Employee of the Civil Service who Name, Rank/Category, and NIP as stated in the Attachment of this Decision are considered capable and meet the requirements to be appointed/promoted as Authority Budget User (KPA), Official Commitment (PPK), Official Signature of Payment Order (PPSPM), and Head of Expenditure Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Deconcentration Year Budget 2021;
- c. that in connection with the purpose of the letter a and letter b above, so that its implementation can run smoothly, need to grant/promote Authority Budget User (KPA), Official Commitment (PPK), Official Signature of Payment Order (PPSPM), and Head of Expenditure Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Deconcentration on the Labor Service Province of Lampung Year Budget 2021 and to set it with the Decision of the Governor of Lampung;
- Remember** : 1. Law Number 17 Year 2003 on National Finance;
2. Law Number 1 Year 2004 on National Fiscal Management;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang:
- menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang:
- menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
- menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-1-2021

GOVERNOR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.06/HK/2021
 TANGGAL : 28 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA
 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	(026) (08) (12) (129014)	-	522.600.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	522.600.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	026.08.DN. 2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	66.357.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	026.08.DN. 2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	54.250.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.3	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	026.08.DN. 2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	73.583.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.4	SP DIPA-026.08.3.129014/2021 23-11-2020	026.08.DN. 2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	142.410.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	SP DIPA-026.08.3. 129014/2021 23-11-2020	026.08.DN. 2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	186.000.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Syifa Aini, S.Sos, MM NIP 19660321 198602 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	(026) (13) (12) (129015)	-	3.439.924.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.439.924.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Tabrizal Satiya, M. Si NIP 19680506 198909 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.1	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	026.13.DL. 4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktifitas Binalattas	238.672.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Tabrizal Satiya, M. Si NIP 19680506 198909 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.2	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	026.13.DL. 4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	2.661.564.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Tabrizal Satiya, M. Si NIP 19680506 198909 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	026.13.DL. 4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	352.048.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Tabrizal Satiya, M. Si NIP 19680506 198909 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.4	SP DIPA-026.13.3. 129015/2021 23-11-2020	026.13.DL. 4060	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	187.640.000,-	Dr. Agus Nompitu, SE, MTP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Tabrizal Satiya, M. Si NIP 19680506 198909 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI